

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah masalah yang tidak ada habis-habisnya di Negara kita. PMKS merupakan Individu atau kelompok yang memiliki suatu kesulitan dikarenakan adanya gangguan dalam permasalahan sosial sehingga mengakibatkan kurang mampunya dalam melakukan fungsi sosial dan hubungan dengan lingkungannya serta kurang mampu dalam pemenuhan kebutuhan jasmani maupun rohani secara normal.

Kategori PMKS sendiri berjumlah 26 macam dengan kriteria-kriteria tertentu berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 8 Tahun 2012 dan salah satunya Tuna Susila. Tuna Susila yaitu seseorang melakukan hubungan seksual dengan lawan jenisnya secara berulang-ulang dan bergantian diluar perkawinan yang sah dengan tujuan mendapatkan imbalan, materi atau jasa.

Tuna Susila biasanya identik dengan wanita dan kita akhirnya mengenal dengan istilah Wanita Tuna Susila (WTS). WTS ini dikategorikan penyimpangan sosial karena tidak sesuai dengan norma-norma atau adat istiadat masyarakat kita. Selain WTS banyak juga istilah yang sering kita dengar seperti pelacur, pekerja seks komersial (PSK), lonte dan kupu-kupu malam. Biasanya para WTS ini memiliki organisasi yang dilembagakan dan dilegalkan oleh pemerintah kita dengan tujuan pemberdayaan dan pembinaan yang kita kenal dengan Lokalisasi.

Lokalisasi sendiri hampir merata ada di seluruh wilayah Indonesia dan menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah daerah masing-masing. Maka dari itu, pemerintah provinsi Jawa Timur dalam rangka mengatasi permasalahan Tuna Susila ini mengeluarkan suatu kebijakan dengan terbitnya sebuah Instruksi Gubernur Jatim untuk menutup seluruh Lokalisasi yang ada di wilayah Jawa Timur.

Kebijakan ini di rasa sangat berat oleh sebagian masyarakat khususnya bagi mereka yang terkena dampak dari kebijakan ini dan mengingat dampak yang ditimbulkan dari berbagai aspek kehidupan. Untuk itu, setiap masing-masing pemerintah daerah yang ada di Jawa Timur harus memiliki program dan pelaksanaan yang matang pada saat proses ataupun pasca penutupan dengan tujuan agar dampak dari penutupan ini tidak begitu signifikan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana analisis kinerja DINSOSNAKERTRANS Ponorogo dalam menanggulangi Penyandang Masalah kesejahteraan Sosial (PMKS) khususnya tentang penutupan dan pembongkaran bangunan Lokalisasi di Desa Kedung Banteng, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui analisis kinerja DINSOSNAKERTRANS Ponorogo dalam penanggulangan Penyandang Masalah kesejahteraan Sosial (PMKS) khususnya penutupan dan pembongkaran bangunan Lokalisasi di Desa Kedung Banteng, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi masyarakat : Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat dan pengetahuan yang mendalam bagi masyarakat sosial pada umumnya khususnya masyarakat Ponorogo pasca penutupan lokalisasi ini.
2. Bagi Pemerintah Daerah : Menjadikan tolak ukur dalam pengimplementasian kebijakan-kebijakan yang bersinggungan dalam mensejahterakan masyarakatnya dengan mempertimbangkan segala aspek yang menguntungkan masyarakatnya atau merugikan masyarakatnya khususnya dalam kasus ini.
3. Bagi Akademik : sekiranya juga sedikit banyaknya sumbangsih beberapa pengetahuan khususnya dalam perkembangan dalam bidang ilmu sosial dan memberikan refrensi bagi dunia akademik dalam kasus ini.

E. Penegasan Istilah

1. Analisis adalah memahami segala informasi yang ada dalam sebuah kasus untuk mengetahui isu yang sedang terjadi yang kemudian memutuskan tindakan apa yang harus di kerjakan dengan tujuan menyelesaikan masalah. (Boulton dalam Freddy Rangkuti, 1997:14). Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Departemen Pendidikan Nasional Edisi ke-3 Analisis adalah penguraian suatu pokok atas berbagai bagian dan penelaahan bagian itu, serta berhubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti secara menyeluruh.

2. Kinerja adalah suatu konstruk (construct) yang bersifat multidimensional, pengukurannya juga bervariasi tergantung pada kompleksitas factor-faktor yang membentuk kinerja.¹
3. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi dibentuk berdasarkan Perda Kabupaten Ponorogo Nomor 60 Tahun 2008 Tanggal 30 Tentang uraian Tugas dan Fungsi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang dipimpin oleh Kepala Dinas. Dalam menjalankan tugasnya, Kepala Dinas nantinya akan dibantu oleh seorang Sekretaris dan empat orang Kepala Bidang, yang terdiri dari Bidang Pemberdayaan dan Bantuan Sosial, Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial, Bidang Pemberdayaan Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan Bidang Perlindungan Tenaga Kerja.
4. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, penanggulangan adalah upaya yang dilaksanakan untuk mencegah, menghadapi, atau mengatasi suatu keadaan mencakup aktivitas preventif dan sekaligus berupaya untuk memperbaiki perilaku seseorang yang telah dinyatakan bersalah. Dengan kata lain upaya penanggulangan WTS dapat dilakukan secara preventif dan refresif.
5. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya,

¹ Mahmudi, *Manajemen Kinerja Sektor Publik*, hal 6.

sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani maupun sosial secara memadai dan wajar.²

F. Landasan Teori

Menurut Jonathan H. Turner (1986) dalam bukunya *Social Theory Today*, teori adalah proses mengembangkan ide-ide yang membantu kita menjelaskan bagaimana dan mengapa suatu peristiwa terjadi. Sedangkan menurut Little John dan Karen Foss adalah sebuah sistem konsep yang abstrak dan hubungan-hubungan konsep tersebut yang membantu kita memahami sebuah fenomena.

A. Analisis Kebijakan

Pembuatan kebijakan publik merupakan bagian dari salah satu proses dalam menjalankan fungsi daripada suatu lembaga atau institusi. Pembuatan kebijakan merupakan pekerjaan yang sulit dan rumit, bahkan Charles Lindblom menyatakan bahwa perumusan kebijakan publik sejatinya merupakan proses politik yang sangat beragam dan membutuhkan proses analisis, di samping itu juga kebijakan publik merupakan sesuatu yang tidak mengenal kapan diawali dan kapan diakhiri.³

Di dalam suatu konsep kebijakan, kebijakan publik dapat digolongkan ke dalam berbagai jenis kebijakan, dan banyak para pakar mengajukan jenis kebijakan publik berdasarkan sudut pandangannya masing-masing. James

² Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 8 Tahun 2012, Hal. 4

³ Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*, Hal. 16.

Anderson (1979) misalnya di dalam bukunya yang berjudul *Public Policy Making*, yang telah diterjemahkan, menyampaikan beberapa kategori tentang kebijakan publik yang berkaitan dengan kasus ini, diantaranya:

- Kebijakan Substansif versus kebijakan prosedural. Kebijakan substansif yakni kebijakan yang menyangkut apa yang dilakukan oleh pemerintah. Sedangkan kebijakan prosedural adalah bagaimana kebijakan substansif itu dapat dijalankan.
- Kebijakan material versus kebijakan simbolis. Kebijakan material adalah kebijakan yang memberikan keuntungan sumber daya yang kongkrit pada kelompok sasaran. Sedangkan kebijakan simbolis adalah kebijakan yang memberikan mamfaat simbolis pada kelompok sasaran kebijakan tersebut.⁴

Di dalam pembuatan kebijakan ini, ada beberapa macam model dalam pembutaannya, misalnya seperti tipologi yang dikemukakan oleh Thomas R. Dye, seorang ahli Nicholas Henry (1980) di dalam bukunya yang berjudul *Doing Public Administration* mengelompokkan tipologi ini menjadi dua klasifikasi, yakni pertama, kebijakan ditinjau dari sudut pandang proses, dan yang kedua, kebijakan publik ditinjau dari sudut pandang hasil dan akibat atau efeknya.⁵

Berdasarkan penjelasan di atas mengenai perumusan kebijakan, terdapat hal-hal penting yang tidak bisa lepas dalam perumusannya. Bagi masyarakat luas

⁴ Suharno, *Dasar-dasar Kebijakan Publik: Kajian Proses dan Analisis Kebijakan*, Hal. 15-16.

⁵ *Ibid*, Hal. 51

baik itu antar individu atau kelompok di dalamnya, kebijakan tidak boleh lepas dari aspek nilai, etika, norma dan pedoman moral tertentu, yang selalu mewarnai kepentingan-kepentingan mereka yang bersifat privat ataupun publik. Aspek etika dan moral dalam analisis kebijakan akan memberikan kerangka dalam menganalisis dan merekomendasikan aksi-aksi kebijakan, agar kemanfaatan output yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan kepentingan individu, kelompok, dan masyarakat yang nantinya akan menjadi sasaran kebijakan tersebut.⁶

Pada saat proses analisis kebijakan terdapat beberapa tahapan yang harus dilaksanakan di antaranya :

1. Perumusan Strategi

Tahap ini merupakan tahap penting dalam proses pengendalian manajemen kebijakan, karena jika salah dalam perumusan akan mengakibatkan kesalahan dalam arah organisasi. Sebagai contoh jika suatu kapal ingin berlayar dari Jakarta menuju Surabaya, seorang kapten harus memfokuskan untuk berlayar ke arah Surabaya, jika arah perjalanan salah, strategi kurang tepat dan sumber daya yang kurang memadai, tentu kapal itu tidak akan sampai ke Surabaya.

Dalam organisasi, penentuan arah dan tujuan suatu kebijakan berupa merumuskan visi, misi, tujuan dan nilai dasar organisasi. Perumusan ini merupakan kegiatan merancang masa depan, kegiatan ini membutuhkan ketajaman visi dan intuisi karena hal ini dapat melihat realitas masa depan yang

⁶ *Ibid*, Hal. 125

melampaui masa depan kini. Hal ini sangat berpengaruh besar pada dalam menentukan suatu kebijakan, visi-lah yang menyatukan orang, bukan semata-mata kharisma seorang pemimpin.

Perumusan ini merupakan tahap pembangunan mental, moral dan spritual. Tahap selanjutnya berkaitan dengan pembangunan fisik berupa pemograman, penganggaran dan implementasi. Pemabangunan fisik akan lebih mudah jika mental, moral dan spritual sudah dibangun kokoh. Sebagai contoh, jika pemerintah ingin membangun sebuah stadion betaraf Internasioanal dan terbesar di Asia, pemerintah tidak serta merta membeli tanah dan bahan material untuk pembangunan. Stadion yang megah dan bertaraf Internasional itu tidak akan pernah berdiri jika tidak ada visi, misi, tujuan dan nilai dasar yang mendasarinya. Visi, misi, tujuan dan nilai dasar ini jika hanya dimiliki oleh kepala daerah atau seorang menajer tidak akan terwujud juga, hal ini harus ditularkan , dibagi dan dikomunikasikan ke seluruh personel yang ada dalam organisasi agar tercipta visi, misi, tujuan dan nilai bersama.

2. Perencanaan yang strategis

Di dalam visi, misi, tujuan dan nilai yang sudah ada tadi kita implementasikan ke dalam perencanaan yang strategis berupa program-program yang kongrit. Perencanaan yang strategis merupakan aktivitas untuk melahirkan program-program yang baru. Produk perencanaan ini berupa rencana-rencana strategis, sasaran startegis, inisiatif strategis, dan target.

Rencana strategis merupakan hasil penerjemahan dari visi, misi, tujuan dan nilai bersama. Sasaran strategis merupakan hasil penerjemahan strategi ke dalam sasaran-sasaran yang hendak yang dicapai dalam rangka mewujudkan visi, misi dan tujuan. Target merupakan tonggak-tonggak yang digunakan untuk mengetahui tingkat pencapaian strategi. Perencanaan ini juga merupakan jembatan yang menghubungkan antara perumusan strategi dengan penganggaran secara tidak langsung.

3. Penyusunan Program

Tahap pembuatan program merupakan tahap yang dilakukan setelah perencanaan yang strategis. Rencana-rencana yang strategis, sasaran yang strategis dan inisiatif startegis merupakan kerangka konseptual yang harus dijabarkan dalam bentuk program-program. Program merupakan rencana kegiatan dan aktivitas yang dipilih untuk mewujudkan sasaran strategis tertentu beserta sumber daya yang dibutuhkan untuk melaksanakannya.

Penyusunan program-program ini berdasarkan pada empat kriteria di antaranya :

a Kesesuaian (*Fit*)

Kritetria ini digunakan untuk mengetahui tingkat ketepatan atau kesesuaian program yang dilaksanakan organisasi. Kriteria program bisa dinilai sesuai (tepat) meliputi :

- Sesuai dengan tujuan dan misi organisasi

- Kemampuan untuk bisa menggunakan keahlian yang saat ini dimiliki atau ada dalam organisasi; dan
- Kemampuan sumber daya yang tersedia dan adanya keselarasan aktivitas dengan program

b. Kemerarikan Program (*Attractivenees*)

Kemerarikan program adalah di mana program yang diajukan menarik bagi organisasi yang dilihat dari perspektif ekonomi. Program yang tidak sesuai dengan tujuan organisasi diklasifikasikan sebagai program yang tidak menarik. Program dinilai menarik apabila mengandung kriteria berikut :

- Sangat menarik bagi investor yang memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dana
- Pendanaan yang stabil (relatif pasti dan jelas)
- Program tersebut merupakan permintaan pasar dari sebagian masyarakat
- Menarik bagi kelompok *volunteer*
- Hasil program bisa diukur dan dilaporkan
- Berfokus pada pencegahan (*preventif*) dan bukan pengobatan (*kuratif*)
- Jika terpaksa dihentikan, bisa dihentikan dengan biaya (kerugian) yang kecil (*low exit barries*)
- Resistensi yang rendah dari pelanggan terhadap program tersebut

c. Cakupan Pilihan (*Alternative Coverage*)

Cakupan pilihan adalah keluasan pilihan program atas suatu pelayanan yang diberikan organisasi lain. Jika dalam suatu wilayah tertentu banyak program

yang dapat memberikan pilihan layanan yang lebih banyak, maka program tersebut bisa diklasifikasikan cakupan alternatifnya tinggi, tapi jika sebaliknya jika sedikit yang memberikan pelayanan, maka cakupan alternatifnya rendah.

d Posisi Bersaing (*competitive Position*)

Posisi bersaing adalah kemampuan organisasi dalam melaksanakan program dibandingkan dengan organisasi lain. Posisi bersaing ini merupakan kombinasi dari efektivitas organisasi, kualitas, kredibilitas, dan dominan pasar. Program bisa diklasifikasikan memiliki posisi bersaing yang kuat antara lain mengandung kriteria berikut :

- Lokasi program tepat
- Mendapat dukungan yang luas dari masyarakat
- Memperoleh dukungan sumber dana
- Memiliki *track record* atau *image* yang baik
- Pangsa pasar yang dilayani besar
- Waktunya (momentum) tepat
- Paling efisien dan efektif ditinjau dari segi biaya programnya

4. Penganggaran

Program-program yang sudah ditetapkan harus dikaitkan dengan biaya. Biaya program tersebut merupakan gabungan dari biaya aktivitas untuk melakukan program yang sudah ada. Secara agregatif biaya tersebut akan

diringkas dalam bentuk anggaran. Selain anggaran biaya, juga dibuat anggaran pendapatan dan anggaran investasi (modal) untuk melaksanakan program.

5. Implementasi Kebijakan

Pada tahap ini, kepala daerah atau manajer bertanggung jawab untuk memonitor pelaksanaan kegiatan dan bagian akuntansi melakukan pencatatan atas penggunaan anggaran (*input*) dan *output*-nya dalam sistem akuntansi keuangan.

Implementasi kebijakan publik secara konvensional dilakukan oleh negara melalui badan-badan pemerintah. Sebab implementasi kebijakan pada dasarnya merupakan upaya pemerintah untuk melaksanakan salah satu tugas pokoknya, yakni memberikan pelayanan publik. Namun, pada kenyataannya implementasi kebijakan beraneka ragam, baik dalam hal bidang, sasaran, dan bahkan kepentingan, memaksa pemerintah menggunakan kewenangan diskresi, untuk menentukan apa yang harus dilakukan mereka dan apa yang tidak.

Menurut Merilee S. Grindle didalam bukunya yang berjudul *Politics and Policy Implementation in the world* yaitu suatu keberhasilan dalam mengimplementasikan kebijakan akan dipengaruhi oleh dua variabel besar, yaitu variabel isi kebijakan (*content of policy*) dan variabel lingkungan implementasi kebijakan (*context of implementatiton*).

Variabel isi kebijakan meliputi beberapa hal:

- Se jauh mana kepentingan kelompok sasaran atau target groups termuat dalam isi kebijakan. Sebuah kebijakan yang didalamnya memuat

kepentingan kelompok sasaran akan lebih mudah diimplementasikan, daripada kebijakan yang tidak memuat?

- Jenis manfaat yang diterima oleh target groups atau sasaran kebijakan, tentunya sebuah kebijakan akan lebih bermanfaat jika sesuai dengan kebutuhan dari sasaran kebijakan.
- Sejauh mana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan. Sebuah kebijakan dengan tujuan untuk mewujudkan perubahan fisik, seperti membangun jembatan atau jalan raya akan lebih mudah diimplementasikan daripada kebijakan yang ditujukan untuk meningkatkan sumber daya manusia?
- Apakah letak sebuah program sudah tepat? Dalam hal ini yang dimaksud adalah apakah implementator kebijakan tersebut sudah tepat di serahkan kesebuah institusi, contohnya dalam hal penutupan ini.
- Apakah sebuah kebijakan telah menyebut implementatornya dengan rinci. Dalam hal ini instansi-instansi yang terkait untuk sebagai implemntator kebijakan? Kejelasan implementator kebijakan ini diperlukan selain untuk memudahkan implementator untuk melakukan koordinasi, juga untuk memudahkan pengawasan oleh publik.
- Apakah sebuah program didukung oleh sumber daya yang memadai? Kebijakan yang tidak didukung oleh sumber daya yang memadai akan mendapat hambatan dalam setiap implementasi. Sumber daya yang dimaksud dapat berupa sumber daya financial maupun kompetensi dari implementator.

Sedangkan lingkungan implementasi kebijakan mencakup tiga aspek berikut ini:

- Seberapa besar kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan.
- Karakteristik institusi dan rezim yang terbuka.
- Tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran.

Proses suatu kebijakan akan dipengaruhi oleh beberapa faktor apakah kebijakan publik itu layak untuk dijadikan sebagai pedoman kebijakan publik. Faktor-faktor itu sebagai berikut:

6. Evaluasi Kinerja

Pelaporan kinerja organisasi harus memiliki dua manfaat utama yaitu bagi pihak internal dan eksternal. Bagi pihak internal laporan kinerja digunakan sebagai alat pengendalian manajemen untuk menilai kinerja manajer dan staf. Bagi pihak eksternal laporan kinerja berfungsi sebagai alat pertanggungjawaban organisasi. Laporan kinerja, bagi manajer memungkinkan untuk membandingkan antara input dan output yang direncanakan dengan realisasinya. Jika terdapat penyimpangan yang signifikan, manajer dapat melakukan tindakan koreksi sebagai umpan balik. Evaluasi kinerja dalam sistem pengendalian manajemen meliputi :

- Evaluasi kinerja organisasi

Ini merupakan penilaian kinerja organisasi secara keseluruhan. Penilaian ini dimaksudkan untuk menilai kinerja manajer pusat pertanggungjawaban. Penilaian kinerja organisasional berdampak pada pemberian penghargaan, kritik yang sifatnya membangun, kenaikan pangkat, penugasan kembali, atau pemberhentian dan pemecatan kepada manajer pusat pertanggungjawaban.

- Evaluasi program

Evaluasi kinerja dapat digunakan sebagai dasar untuk melakukan evaluasi program. Pelaksanaan program yang tidak optimal memerlukan revisi anggaran program. Jika evaluasi program menunjukkan bahwa program yang dilaksanakan tidak efektif, maka manajer perlu mengkaji ulang terhadap strategi untuk mencapai tujuan, atau bahkan merevisi tujuan.

7. Umpan Balik

Tahap terakhir adalah pemberian umpan balik (*feedback*). Tahap ini dilakukan sebagai sarana untuk melakukan tindak lanjut (*follow up*) atas prestasi yang dicapai. Apabila berdasarkan penilaian kinerja dinyatakan organisasi belum berhasil mencapai visi, misi dan tujuan yang ditetapkan, maka kemungkinan perlu dilakukan penentuan ulang atas perumusan strategi organisasi.⁷

⁷ Mahmudi, *Manajemen Kinerja Sektor Publik*, hal. 71-72.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian diskriptif dengan pendekatan kualitatif yang terjun langsung ke lapangan tempat penelitian. Menurut Anselm Strauss (2003:4) yang dimaksud dalam penelitian diskriptif dengan pendekatan kualitatif adalah jenis penelitian yang temuan temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan di dua tempat yang berbeda yaitu di Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Kabupaten Ponorogo di Jalan Budi Utomo Ponorogo Samping Universitas Muhammadiyah Ponorogo dan di Desa Kedung Banteng Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo karena hanya disinilah kawasan lokalisasi itu berada dan diresmikan oleh pemerintah daerah.

3. Informan

Informan adalah orang-orang yang mau dan akan di jadikan sebagai sumber informasi berdasarkan fakta lapangan yang ada pada saat itu. Seorang informan memiliki kewajiban menjadi sukarelawan menjadi anggota tim peneliti baik hanya bersifat nonformal.⁸ Maka dari itu, peneliti memilih di antaranya :

- Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi kabupaten Ponorogo karena dinas inilah yang merupakan pembuat serta pelaksana proses kebijakan ini.

⁸ Lexi Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Hal. 90

Selain itu, dinas ini merupakan subyek yang mengatur dan mengurus masalah Penyandang Masalah Kemiskinan Sosial (PMKS) serta bertanggung jawab dalam mensejahterakan masyarakat ponorogo termasuk masyarakat Lokalisasi tersebut. Dalam hal ini akan di wakili oleh Bapak Sudiono selaku Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial dan Tuna Wisma Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Ponorogo.

- Masyarakat dan warga Lokalisasi tersebut yang ada di Desa Kedung Banteng kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo dan di antaranya kepala desa Kedung Banteng yaitu Bapak Sunaryo karena beliau merupakan perwakilan masyarakat setempat untuk mewakili atau sebagai penyambung lidah dalam menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintah setempat beserta pengurus birokrasi desa setempat, dan kemudian sesepuh warga Lokalisasi pemilik wisma yaitu Bapak Bejo Utomo. Di samping itu juga, mereka merupakan korban hilangnya mata pencaharian sehabis penutupan lokalisasi ini.
- Bapak AKP Denny selaku KAPOLSEK Kecamatan Sukorejo yang merupakan Aparat Keamanan dari pihak Kepolisian khususnya wilayah Kecamatan Sukorejo karena merekalah yang bertanggungjawab dari segi keamanan pada saat proses kebijakan dijalankan.
- Dari kalangan Akademisi yaitu dosen fakultas Ilmu sosial dan Ilmu politik Universitas Muhammadiyah Ponorogo Bapak Khoirurrosyidin, S. Ip, M. Si dari segi *Good Governance* pemerintahan daerah dan bapak Yusuf Harsono, M. Si dari segi Pengamat sosial, kalangan ini penting karena bisa

dijadikan rujukan bagi peneliti dalam menganalisis data dan bagi masyarakat dalam mengontrol para pembuat kebijakan beserta pelaksanaannya ataupun pemerintah daerah dalam membuat dan melaksanakan kebijakannya.

4. Teknik Penentuan Informan

Penentuan sampel atau informan dalam penelitian kualitatif memiliki manfaat untuk mendapatkan informasi yang maksimal. Oleh karena itu orang yang dijadikan sampel atau informan sebaiknya yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Mereka yang menguasai atau memahami masalah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) di lingkungan DINSOSNAKERTRANS Kabupaten Ponorogo, khususnya terhadap kasus penutupan dan pembongkaran tempat Lokalisasi ini.
- b. Mereka yang terlibat dalam kasus ini baik itu secara langsung di tempat penelitian maupun tidak.
- c. Mereka mempunyai cukup waktu untuk diwawancarai.
- d. Mereka tidak cenderung menyampaikan informasi hasil kemasannya sendiri.

Informan yang dipakai di dalam penelitian ini diambil dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik ini bertujuan untuk menyeleksi

informasi sebanyak-banyaknya dari berbagai macam sumber dan bentuknya. Teknik ini merupakan karakter dari dasar penelitian kualitatif.⁹

5. Metode/Teknik Pengumpulan Data

a. Interview

Teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan dialetika Tanya jawab dengan informan atau wawancara langsung ditujukan supaya mendapat informasi yang akurat terkait obyek penelitian.

b. Observasi

Teknik pengumpulan data semacam ini bertujuan supaya peneliti dapat melihat keadaan atau fakta yang sedang berlangsung di tempat penelitian tersebut.

c. Dokumentasi

Yaitu teknik pengumpulan data yang berupaya mengumpulkan data-data yang bersumber dari buku-buku, artikel, sosial media(dunia maya) yang berkaitan dengan obyek penelitian.

d. Analisis Data

Teknik Analisis yang digunakan oleh peneliti adalah analisis model interaktif (interactive model of analysis). Menurut Miles dan Huberman (1992:16) dalam model ini tiga komponen analisis, yaitu reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan, dilakukan dengan bentuk interaktif dengan proses

⁹ *Ibid*, Hal. 90

pengumpulan data (*data collecting*) sebagai suatu siklus. Ketiga kegiatan dalam analisis model interaktif dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Reduksi data (*data reduction*)

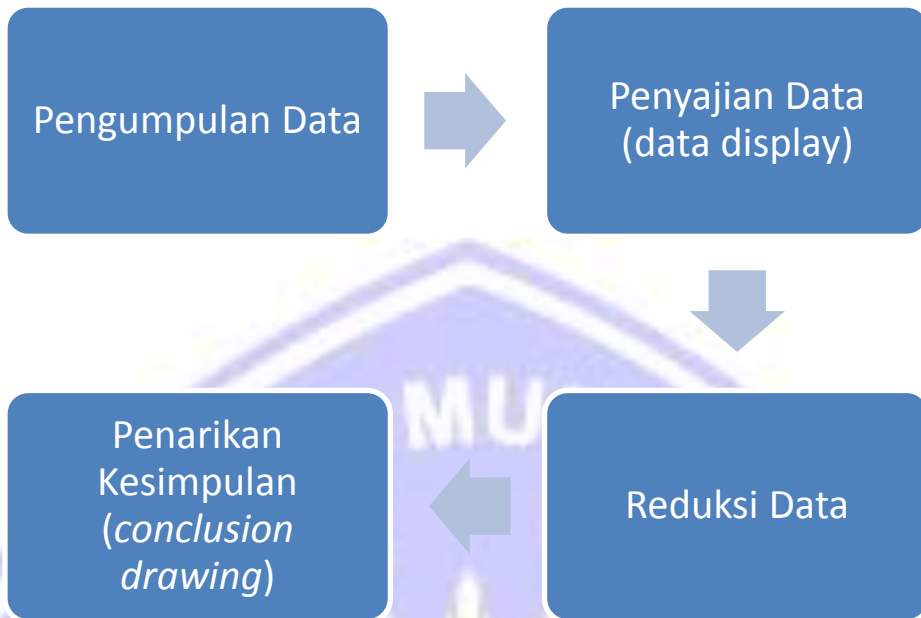
Diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyerderhanaan data “kasar” yang muncul dalam catatan-catatan tertulis di lapangan. Proses ini berlangsung terus menerus selama penelitian. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang berfungsi menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data.

2. Penyajian data (*data display*)

Diartikan sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan penyajian data, peneliti akan dapat memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan berdasarkan pemahaman tentang penyajian data.

3. Penarikan kesimpulan (*conclusion drawing*)

Kesimpulan yang diambil akan ditangani secara longgar dan tetap terbuka sehingga kesimpulan yang semula belum jelas, kemudian akan meningkat menjadi lebih rinci dan mengakar dengan kokoh. Kesimpulan ini juga diverifikasi selama penelitian berlangsung dengan maksud-maksud menguji kebenaran, kekokohan dan kecocokannya yang merupakan validitasnya.



Gambar proses analisis data